

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Pelalawan

Wilayah kabupaten pelalawan, berawal dari kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera (sekitar tahun 1380 M) yang dating dari kerajaan Temasik (Singapura). Lokasi kerajaan ini ialah dihulu sungai Pekantua, lebih kurang 20 km dihulu Muaratalam-Kampar (anak sungai Kampar, sekarang termasuk desa Tolam, kecamatan Pelalawan, kabupaten Pelalawan), pada tempat yang bernama “Pematang Tuo”. Sekitar tahun 1725 M, diumumkan oleh Maharaja Dinda II bahwa dengan kepindahan itu, maka nama kerajaan Pekantua Kampar diganti menjadi kerajaan Pelalawan yang maknanya “tempat lalauan atau tempat yang sudah lama di cadangkan”.

Pelalawan dalam tahun 1944 termasuk dalam selat Panjang-Gun, namun pada tanggal 1 Januari 1945 Pelalawan terlepas dari Selat Panjang dan berdiri sendiri Pelalawan Gun (Kewedanaan) yang meliputi empat Ku (kecamatan) yakni Kuala Kampar, Bunut, Pangkalan Kuras, dan Langgam. Setelah terjadinya penyerahan kedaulatan dan pemulihan kembali pemerintahan sipil, lahirilah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Status Keresidenan dan Kewedanaan dihapuskan sehingga memperpendek tangga hirarki pemerintahan. Dalam undang-undang No. 22 tahun 1948 tersebut Kewedanaan Pelalawan dipecah dua, tiga kecamatan bergabung dengan Kabupaten Bengkalis dan satu bergabung dengan Kabupaten Kampar yang pada saat itu masih Pekanbaru ibukotanya.

Beberapa tahun kemudian terjadi lagi perubahan dengan lahirnya undang-undang No. 12 tahun 1956, menetapkan Kewedanaan Pelalawan terlepas dari kabupaten Bengkalis dan bergabung dengan kabupaten Kampar. Sejak itu Pelalawan sebagai ibukota Kewedanaan menjadi Kepenghuluan atau Kedesaan dalam wilayah kecamatan Bunut hingga tahun 2000.

Dilihat dari segi pendapatan daerah Pelalwan termasuk penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar. Sejak tahun 1980-an daerah ini menjadi tujuan transmigrasi yang mitra dengan perkebunan yang besar dan menengah tingkat nasional terutama dalam mengelola kelapa sawit dan mendirikan beberapa pabrik. Sedangkan penduduk tempatan lebih banyak berkebun kelapa dan karet. Kemudian didaerah ini juga terdapat PT RAPP, Pabrik Indo Sawit, ditambah lagi hasil kayu, rotan, perikanan, dan minyak bumi. Sepertinya hasil alam tersebut belum banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempatan, akan tetapi lebih banyak dinikmati di daerah oleh investor atau konglomerat dan kaum pendatang umunya.

Dalam era reformasi banyak wilayah yang dimekarkan seperti pada luar pulau Sumatra, ide dan cita-cita tersebut terus bergulir dan menjadi perbincangan hangat sesama orang Pelalawan baik di Pekanbaru maupun Bangking. Untuk merelisasikannya diadakan rapat tokoh-tokoh masyarakat Kampar bagian Hilir di rumah Prof. Dr. H. tengku Dahril, MSc tanggal 31 januari 1999 pukul 20:00-24:00 WIB. Rapat malam tersebut menyepakati pembentukan formatur Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Pelalawan yang secara aklamasi memilih Prof. Dr. H. tengku Dahril, MSc sebagai Ketua Umum dan Drs. H . T . Ilyas Usman

sebagai Sekretaris Umum serta beberapa orang anggota. Selain itu rapat tersebut menyepakati Rapat Akbar Masyarakat Kampar Bagian Hilir tanggal 4 Februari 1999 bertempat di aula SMAN 1 Langgam di Pangkalan Kerinci (sekarang SMAN 1 Pangkalan Kerinci).

Tanggal 11-13 April 1999 dilaksanakan kegiatan Seminar dan Musyawarah Besar di Pangkalan Kerinci. Kegiatan ini dibuka secara resmi Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Setwilda Riau, H. T. Rafian, B.A bertempat di taman hiburan Lago Indah Pangkalan Kerinci, tanggal 11 April 1999 malam. Adapun tujuan dari Seminar dan Musyawarah Besar ini untuk menghimpun dan menyatukan Visi, Misi, Persepsi, dan aspirasi masyarakat Kampar Bagian Hilir dalam perjuangan pembentukan kabupaten baru di eks kerajaan atau kewedanaan Pelalawan yang terdiri atas empat kecamatan yaitu Langgam, Bunut, Kuala Kampar dan Pangkalan Kuras. Selanjutnya untuk menghimpun pendapat, gagasan, dan saran mengenai kemungkinan pembentukan kabupaten baru dikawasan Kampar Bagian Hilir dari berbagai Sumber dan tokoh masyarakat baik yang berada di Jakarta, Pekanbaru, Bangkinang, maupun yang berada dikawasan Kampar Bagian Hilir.

Kegiatan ini juga menghimpun dan menginventarisasikan data dan informasi yang dapat mendukung pembentukan kabupaten dikawasan Kampar Bagian Hilir yang didasarkan atas pertimbangan sejarah, geografis, potensi sumber daya alam. Sumber daya manusia, ekonomi, sosial budaya pertahanan dan keamanan, aspirasi masyarakat, political will (kehendak politis) pemerintahan dan prospek masa depannya.

Pada akhir Agustus 1999 sudah terdengar informasi mengenai pembentukan kabupaten pelalawan. Pada tanggal 16 September 1999 disepakati UU No. 53 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten pelalawan bersama dengan 8 kabupaten atau kota lainnya diprovinsi riau. Peresmian kabupaten pelalawan dilakukan oleh Gubernur Riau (H. Saleh Jasit, SH) tanggal 5 November 1999, yang bertempat dikantor Bupati Pelalawan. Kabupaten Pelalawan memiliki luas wilayah 13.924, 94 Km² dan total penduduk 356.945 jiwa, kabupaten pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan dan 110 Desa dan Kelurahan. Adapun batasan-batasan wilayah kabupaten pelalawan meliputi:

- Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
- Selatan berbatasan dengan Kuantan Singingi dan Pasir Peny
- Barat berbatasan dengan Kampar dan Pekanbaru
- Timur berbatasan dengan Karimun dan Indragiri Hilir

B. Profil Singkat Kecamatan Pangkalan Kuras

Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki Visi perubahan menuju terwujudnya pelayanan maksimal, seni budaya dan kerukunan masyarakat, kemudian untuk mencapai visi tersebut disusunlah misi antara lain :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan
2. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana
3. Menciptakan sarana pelayanan yang dapat memberikan kenyamanan masyarakat
4. Meningkatkan sarana seni dan budaya
5. Meningkatkan sarana keagamaan

Kecamatan Pangkalan Kuras terdiri dari satu Kelurahan dan 16 Desa, antara lain :

1. Tanjung Beringin
2. Talau
3. Kesuma
4. Betung
5. Sorek Satu
6. Sorek Dua
7. Dundangan
8. Surya Indah
9. Beringin Indah
10. Sialang Indah
11. Terantang Manuk
12. Palas
13. Harapan Jaya
14. Meranti
15. Kemang Batang Kulim
16. Sido Mukti

C. Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan

Stuktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan terakhir kalinya diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten Pelalawan nomor 2 tahun 2010 tanggal 4 januari 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor 7 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten pelalawan. Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial, dipimpin oleh seorang kepala dinas.

Untuk menjelaskan tugasnya Dinas Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi meliputi

:

- a. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan;
- b. Melaksanakan pentunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kegiatan rutin dan pembangunan;
- c. Menyusun peta dan data penyanggah masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pelalawan;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan kegiatan instansi terkait;
- e. Membagi habis semua kegiatan rutin dan pemabangunan;
- f. Memberi penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi;
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

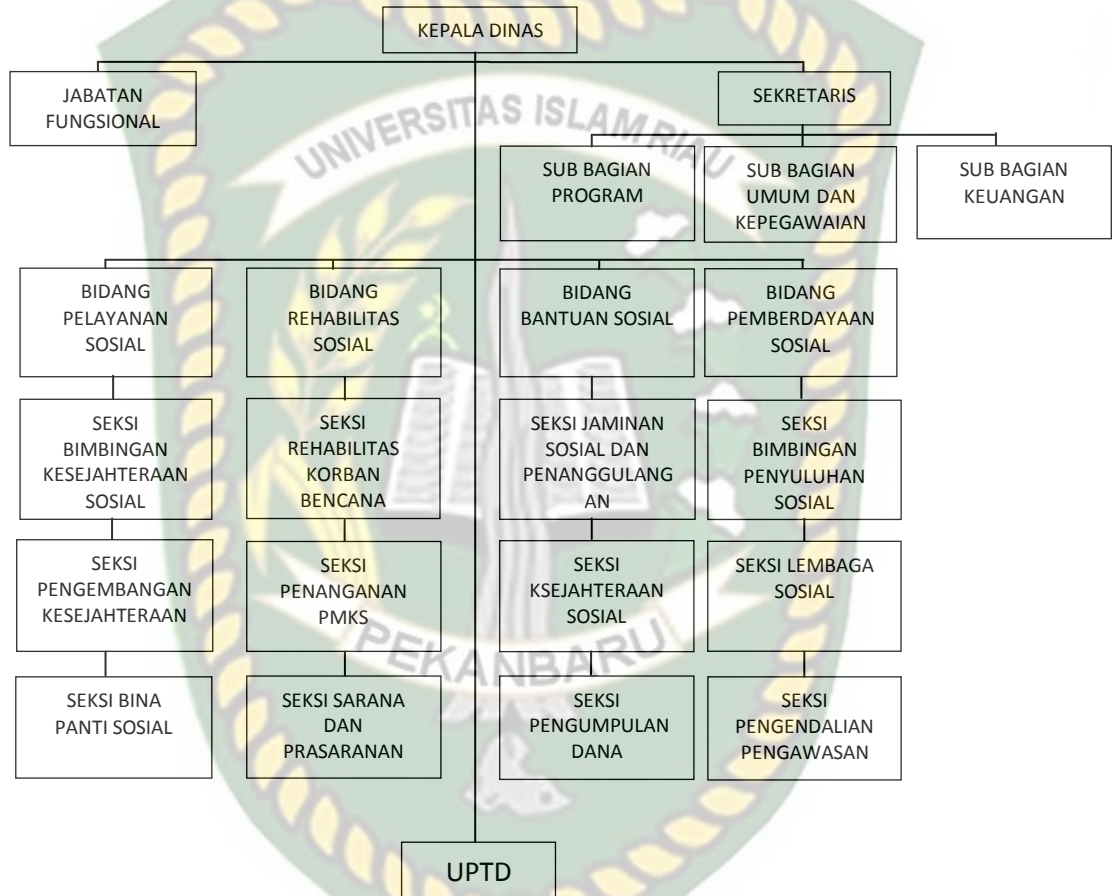
Selanjutnya susunan Dinas Kesejahteraan Sosial meliputi :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pelayanan Sosial
 1. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Sosial
 2. Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
 3. Seksi Bina Panti Asuhan
- d. Bidang Rehabilitas Sosial
 1. Seksi Rehabilitasi Korban Bencana
 2. Seksi Penanganan PMKS
 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Bantuan Sosial
 1. Seksi Jaminan Sosial dan Penanggulangan Bencana
 2. Seksi Kesejahteraan Sosial
 3. Seksi Pengumpulan Dana Bantuan Sosial
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial
 1. Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial
 2. Seksi Bina Lembaga Sosial
 3. Seksi Pengendalian Pengawasan Dana Bantuan Sosial
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut ini ialah Struktur Organisasi Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan :

Gambar . IV. 1. Struktur Dinas Kesejahteraan Sosial



Sumber : Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan, 2018

D. Tugas dan Fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Pelalawan

1. Kepala Dinas

Kepala dinas selaku kepala satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan seluruh kegiatan dinas sesuai kewenangannya.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja, koordinasi, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan tugas dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan ke sekretariat
- b. Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas semua bidang secara terpadu
- c. Perumusan kebijakan pelayanan administratif dinas
- d. Pelaksanaan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sekretariat dinas
- e. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga dinas
- f. Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketata laksanaan serta hubungan masyarakat
- g. Penginventarisan permasalahan-permasalahan guna menyiapkan petunjuk pemecahan masalah
- h. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi pengelolaan pegawai
- i. Perumusan kebijakan administrasi keuangan

Secreatariat terdiri dari 3 sub bagian yaitu :

- a. Sub bagian Program
- b. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Sub bagian keuangan

3. Bidang Pelayanan Sosial

Bidang pelayanan sosial mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh seksi dibawahnya, melaksanakan koordinasi pembinaan, pengendalian serta pelayanan kesejahteraan soasial yang berkaitan dengan bimbingan pengembangan potensi kesejahteraan sosial serta terhadap

panti sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Pelayanan Sosial dipimpin oleh seorang kepala Bidang Pelayanan Sosial, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga sosial
- b. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sosial potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
- c. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana binaan sosial
- d. Pelaksanaan koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial
- e. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengendalian bantuan terhadap keluarga miskin, orang terlantar dan lansia jompo
- f. Pelaksanaan pembagian tugas arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
- g. Pelaksanaan tugas lain dari kepala dinas sesuai dengan tugasnya

Bidang pelayanan sosial terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Sosial
- b. Seksi Pembangunan Potensi Kesejahteraan Sosial
- c. Seksi Bina Panti Sosial

4. Bidang Rehabilitas Sosial

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis serta pemilihan dan pengembangan kesejahteraan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dalam melaksanakan tugasnya, bidang rehabilitas sosial dipimpin oleh seorang kepala bidang rehabilitasi sosial, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- b. Pelaksanaan rehabilitasi sosial korban bencana dalam dan bencana sosial
- c. Pelaksanaan kegiatan program bantuan terhadap penyandang cacat
- d. Pelaksanaan koordinasi rehabilitas dan pencegahan korban NARKOBA/NAPZA, HIV/AIDS, Bekas hukuman, WTS, anak nakal, gelandangan dan pengemis (GEPENG)

- e. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya dari kepala dinas sesuai dengan tugasnya
- Bidang rehabilitas sosial terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi Korban Bencana
- b. Seksi Penangan PMKS
- c. Seksi Sarana dan Prasarana

5. Bidang Bantuan Sosial

Bidang bantuan sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bantuan sosial korban bencana, perintis kemerdekaan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketata laksanaannya sesuai perundang-undangan dan kebijakan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang bantuan sosial dipimpin oleh seorang kepala Bidang Bantuan Sosial, yang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial terhadap korban bencana, kecelakaan dan pengungsi
 - b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan nilai-nilai kepahlawanan, penulisan buku-buku sejarah perjuangan dan pemberian penghargaan
 - c. Pelaksanaan kegiatan pendayagunaan taman makam pahlawan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
 - d. Pelaksanaan pengumpulan dana bantuan sosial dan transparansi penyalurannya
 - e. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan
 - f. Pelaksanaan tugas lain dari kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya
- Bidang bantuan sosial terdiri dari :

- a. Seksi Jaminan Sosial dan Penanggulangan Bencana
- b. Seksi Kesejahteraan Sosial
- c. Seksi Pengumpulan Dana Bantuan Sosial

6. Bidang Pemberdayaan Sosial

Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh seksi dibawahnya. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Memberikan pelayanan teknis terhadap lembaga-lembaga sosial
- b. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan sosial
- c. Melaksanakan kegiatan pengendalian, pengawasan dan bantuan sosial

Bantuan Pemberdayaan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial
- b. Seksi Bina Lembaga Sosial
- c. Seksi Pengendalian Pengawasan Dana Bantuan Sosial

E. Tugas dan Fungsi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Tugas Persiapan Program

Tugas persiapan program meliputi pekerjaan yang harus dilakukan pendampingan untuk mempersiapkan pelaksanaan program. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pembayaran pertama diberikan kepada penerima manfaat :

- Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta PKH;
- Menginformasikan (sosialisasi) program kepada KM peserta PKH dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum;
- Pengelompokan peserta kedalam kelompok yang terdiri ats 20-25 peserta PKH untuk mempermudah tugas pendampingan;
- Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok ibu-ibu peserta PKH (selanjutnya disebut ketua kelompok saja);
- Membantu peserta PKH dalam mengisi formulir klarifikasi data dan menandatangani surat persetujuan serta mengirim formulir terisi kepada UPPKH kabupaten/kota;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kunjungan awal ke pukesmas dan pendaftaran sekolah.

2. Tugas Rutin :

- Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan mengirimkan formulir pemutakhiran data tersebut ke UPPKH kabupaten/kota;
- Menerima pengaduan dari ketua kelompok dan/atau peserta PKH serta dibawah koordinasi UPPKH kabupaten.kota melakukan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima (Lihat Pedoman Operasional System Pengaduan Masyarakat)
- Melakukan kunjungan insidental khususnya kepada peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen;
- Melakukan pertemuan dengan semua peserta setiap enam bulan untuk re-sosialisasi (program dan kemajuan/perubahan dalam program);
- Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok;
- Melakukan pertemuan bulanan dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan dilokasi pelayanan terkait;
- Melakukan pertemuan triwulan dan tiap semester dengan seluruh pelaksana kegiatan : UPPKH Daerah, Pendamping, Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.

Adapun beberapa kegiatan pokok yang harus dilakukan pendampingan PKH, yaitu :

- a. Pertemuan Awal
- b. Mendampingi Proses Pembayaran
- c. Berdiskusi Dalam Kelompok
- d. Pendampingan Rutin
- e. Berkunjung Ke Rumah Penerima Bantuan
- f. Memfasilitasi Proses Pengaduan
- g. Mengunjungi Penyedia Layanan
- h. Melakukan Konsolidasi
- i. Meningkatkan Kapasitas Diri